



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**

**RENCANA KERJA  
( RENJA )**

**PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023**



**DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami Panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas Rahmat dan tuntunannya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) 2023 Dinas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja ( Renja ) PD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan kinerja yang sesuai dengan sistematika Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMP dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJP dan RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah Dokumen ini telah mengacu pada Rencana Pembanguna Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 13 Tahun 2022 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

RENJA PD 2023 ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun, dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur.

RENJA PD 2023 ini memuat Program dan Kegiatan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan dengan mengantisipasi perkembangan mendatang. Kami menyadari bahwa penyusunan RENJA PD 2023 ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami menerima kritik, saran dan masukan dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan RENJA PD 2023.

Larantuka, Juli 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Flores Timur,

**Drs. Ramon Mandiri Piran**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 196705011993031014

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERBUP RENSTRA.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD T.A. 2021 .....</b>	<b>6</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	22
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan TUPOKSI Perangkat Daerah .....	25
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	44
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>47</b>
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.....	48
3.3. Program dan Kegiatan .....	49
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>58</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan).....	6
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	23
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023. ....	27
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 .....	45
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 .....	48
Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 .....	50
Tabel 4.1. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun 2023. ....	59

**Daftar Gambar**

**Hal**

**Gambar 1.1. Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah .....2**



SALINAN

**BUPATI FLORES TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

11. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD Tahun 2023.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
  - c. BAB III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
  - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
  - e. BAB V : Penutup
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2023.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD.
- (3) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2023 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2023.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 4 Juli 2022

**PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,**

ttd

**DORIS ALEXANDER RIHI**

Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 4 Juli 2022

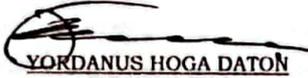
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR,**

ttd

**PAULUS IGO GERODA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 27**

Salinan sesuai dengan aslinya /  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**YORDANUS HOGA DATON**

**PEMBINA TK.I**

**NIP. 19780426 200212 1 007**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2023, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022.

Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah atau disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substansial*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi, (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 merupakan penjabaran Tahun pertama Renstra PD Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023-2026, untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Renja PD Tahun 2023 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Renja PD Tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan; orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi pembangunan Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal; dilakukan berdasarkan Renstra PD dan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2021.
3. Penyusunan Rancangan; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Bupati Flores Timur Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Renja PD



selanjutnya digunakan untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 97);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021.

11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur.
12. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.
13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2023 yang merupakan penjabaran RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

#### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Ketenagakerjaan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan renja perangkat daerah yang terdiri dari , latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini meliputi: Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra , Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini memuat tentang telaah terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta memuat program kegiatan OPD

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur yang merupakan bagian pokok dari penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja ini.

#### **BAB V PENUTUP**

Bagian ini merupakan kesimpulan akhir dari keseluruhan pembahasan pada bab bab sebelumnya

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dalam rangka mewujudkan sebuah organisasi yang akuntabel perlu dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi untuk menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitasnya dengan melakukan klarifikasi atas *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai. Uraian tentang hasil evaluasi rencana kerja tahun lalu dapat dilihat pada rincian table II.1 di bawah ini :

**Tabel II.1**

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan)

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2017- 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun n- 1	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun n-3	Target Renja Perangka t Daerah Tahun n- 2	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
							Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran								
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur								
							Tersedianya Dokumen Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	25	15	5	5	100	5	25	100
	x	x				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									
	x	x	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Program (renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2017-2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun n-3	Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	x	x	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renja, RKA, DPA, DPAP, LAKIP, Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan) (dokumen)</i>	25	15	5	5	100	5	25	100
	x	x	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	x	x	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	<i>Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (kali)</i>		42	14	14	100	14	70	
	x	x	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Tersedianya pelayanan jasa administrasi keuangan (bulan)</i>	60	36	12	12	100	12	60	100
	x	x	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	x	x	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	<i>Tersedianya komponen instalasi listrik dan</i>	26	16	5	5	100	5	26	100

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2017- 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun n- 1	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun n-3	Target Renja Perangka t Daerah Tahun n- 2	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
						Listrik/ Pencerangan Bangunan Kantor	<i>penerangan kantor (jenis)</i>								
	x	x	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (unit)</i>	37	2	0	0	0	6	8	21,6
							<i>Tersedianya Peralatan Gedung Kantor ((unit)</i>	29	20	0	0	0	3	23	79,3
	x	x	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor (jenis)</i>	124	59	28	25	89,2	33	117	94,3
							<i>Tersedianya Alat Tulis Kantor (jenis)</i>	226	115	50	35	70	50	200	88,4
	x	x	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar, buku)</i>	251500	100573	50300	31791	63,2	50300	182664	72,6

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2017- 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun n- 1	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun n-3	Target Renja Perangka t Daerah Tahun n- 2	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	x	x	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan (jenis)</i>	12	4	3	1	33,3	3	8	66,6
	x	x	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Tersedianya makanan dan minuman (OK) (dos)</i>	7000	1810	1400	250	17,8	1400	3460	49,4
	x	x	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar dan kedalam daerah ( kali)</i>	315	165	65	22	33,8	70	257	81,5
	x	x	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</i>								
	x	x	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (kali)</i>	60	36	12	12	100	12	42	70

No	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Daerah) Tahun 2017-2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun n-3	Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun n-1
1			1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	x	x	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan pelayanan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	60	12	12	100	12	42	70
	x	x	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	100	20	20	100	20	20	20
	x	x	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	x	x	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pelayanan jasa perijinan kendaraan dinas / operasional (unit)	28	8	6	75	8	19	67,8
						Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	71	5	12	5	50	15	15	50,7

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2017- 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun n- 1	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n kegiatan s/d Tahun n-3	Target Renja Perangka t Daerah Tahun n- 2	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	x	x	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terawatnya gedung kantor (gedung)	2	2	2	2	100	2	2	100
	x	x	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung/ Kantor (unit)	45	5	26	18	69,2	3	26	57,7
	x	x	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung / Kantor (unit)	108	8	5	5	100	6	19	17,5
2	0	7				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2017- 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun n- 1	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun n-3	Target Renja Perangka t Daerah Tahun n- 2	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	07	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi (Orang)	1120	134	154	0	0	200	152	13,57
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi									
	2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Bimtek dan Kelompok yang didampingi (orang, kelompok)	767	120	154	0	0	154	274	35,7
	2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga kerja (%)	85	45,05	80	68,01	85	85	85	85
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (orang)								

No.	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2017- 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun n- 1	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun n-3	Target Renja Perangka t Daerah Tahun n- 2	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	2	0 7	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Daerah (dokumen)	4							
	2	0 7	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja. (orang)-- >Seminiasi	4016	505	650	0	0	650	1155	28,7
							Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja. (orang)-- >Pembukaan Jalan Baru	6104	1062	1376	0	0	1376	2438	39,9
	2	0 7	05			Program Hubungan Industrial	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)	100	99,37	100	100	100	100	100	100

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2017- 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun n- 1	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan		
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun n-3	Target Renja Perangka t Daerah Tahun n- 2	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
																1
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		100							0	67,1
	2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Terlaksananya Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan (perusahaan)	144	38	35	8	22,8	4	50	34,7	

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2017- 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun n- 1	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun n-3	Target Renja Perangka t Daerah Tahun n- 2	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
						Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Survey KHL; Pembinaan UMP, THR, Perbaikan Syarat Kerja; Pembinaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh; Pembinaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) (Pasar / Perusahaan / Serikat Pekerja)		90	84	6	7,14	10	106	0
	2	0 7	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1	Jumlah Penyelesaian kasus Perselisihan hubungan Industrial (kasus)	50	74	15	15	100	15	104	268

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2017- 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun n- 1	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan		
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun n-3	Target Renja Perangka t Daerah Tahun n- 2	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
																1
						(Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
	2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta non afiliasi	- Jumlah Dokumen UMP, THR dan Data KHL (dokumen)	244	7	1	1	100	2	88	36	
	3	32				Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi										

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2017- 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun n- 1	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan			
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun n-3	Target Renja Perangka t Daerah Tahun n- 2	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
																1	2
	3	3	03			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kelompok dalam UPT yang diberdayakan (kelompok)										
	3	3	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota											
	3	3	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah sarana dan Prasarana Sosial dan Ekonomi yang dibangun. (Unit)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	3	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah Sosialisasi Peraturan Hukum Ketransmigrasian (orang, kali)	2870	43	714	0	0	500	543	18		
	3	3	04			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Wilayah Transmigrasi Baru										

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2017-2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun n-3	Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian								
	3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah bantuan untuk warga transmigrasi lokal (paket)	3322	56	64	0	0	64	120	3

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 terlihat bahwa:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
  - Program Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi pada Tahun 2021 tidak dapat terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran akibat pandemic covid 19.
  - Program Penempatan Tenaga Kerja, pada kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan purna Penempatan ) sub kegiatan peningkatan perlindungan kompetensi Calon PMI dan PMI , berupa perjanjian kerjasama tidak dapat terlaksana sesuai dengan Renja RKPD, dan Sub kegiatan pemberdayaan PMI purna penempatan dengan indicator program /kegiatan adalah penyerapan tenaga kerja juga tidak terlaksana pada beberapa wilayah di Kab. Flores Timur karena adanya *refocusing* anggaran akibat pandemic covid 19
  - Pada program Hubungan Industrial, pada sub kegiatan pencegahan Perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di satu daerah juga tidak mencapai 9 perusahaan yang dipantau karena adanya *refocusing* anggaran.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
  - Pada program Hubungan Industrial, pada sub kegiatan Penyelesaian kasus perselisihan sesuai target 10 kasus dan diselesaikan 15 kasus.
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pada program Hubungan Industrial, pada sub kegiatan Penyelesaian kasus perselisihan sesuai target 10 kasus dan diselesaikan 15 kasus.
- d. Faktor penyebab tidak tercapainya ,terpenuhinya program/kegiatan antara lain karena adanya *refocusing* dana. Pada kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk terpenuhinya capaian indicator program tidak dapat terlaksana tanpa dukungan dana. Faktor penyebab realisasi yang melebihi target kinerja karena angka sengketa pertahun meningkat setiap tahunnya akibat semakin terbukanya lapangan pekerjaan yang membutuhkan suatu upaya pencegahan dan penyelesaian setiap kasus dalam pemberi dan penerima pekerjaan
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah tidak dapat terlaksananya beberapa program yang mendukung visi misi daerah.
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut yakni perlu adanya pengalokasian anggaran berdasarkan analisa kebutuhan pada Dinas Tenaga Kerja terutama yang berkaitan dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang berdampak pada capaian evaluasi secara renja maupun secara renstra serta penggunaan anggaran secara efektif dan efisien dengan selalu memperhatikan kinerja.

## **2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indicator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada table berikut ini

Tabel II.2  
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Flores Timur

No	Indikator	SPM/Standar	IKK	target Renstra perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		catatan analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
<b>Urusan Ketenagakerjaan</b>												
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja Per tahun		V	10	10	10	10	15		10	10	angka sengketa pertahun meningkat setiap tahunnya karena semakin terbukanya lapangan pekerjaan yang membutuhkan suatu upaya pencegahan dan penyelesaian setiap kasus dalam pemberi dan penerima pekerjaan
2	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)		V	10	10	10	10	14		13	10	Meningkatnya jumlah angka sengketa antara pengusaha dan penerima kerja maka dengan penyelesaian oleh mediator penyelesaian dengan upaya perjanjian bersama juga meningkat
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		V	43	49	100	100	55		50	100	selama masa renstra tingkat pengangguran juga tinggi sehingga dibutuhkan upaya peningkatan penempatan tenaga kerja secara prosedural sesuai dengan program nasional
4	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek		V	2494	2544	2600	2600	1190		1200	1300	meningkatnya jumlah penerima kerja sebaiknya diikuti dengan kepesertaan jamsostek sehingga memberikan

												perlindungan dan keamanan bagi penerima kerja
5	Perselisihan Buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	V	21	10	0	0	0	0	0	0	0	masa renstra dan kebijakan tentang pekerja dan pemberi kerja dari pemda selalu mengacu dari pusat sehingga hal ini tidak terjadi
6	Besaran tenaga yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	V	60	60	30	25	0	0	30	25		Kegiatan ini tidak mencapai target karena bberapa tahun terakhir ini adanya refocusing karena pandemi covid 19 sehingga kegiatan ini tidak dapat terlaksana
7	Besaran tenaga yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	V	120	120	0	0	0	0	0	0		Pelatihan ini tidak ada dalam masa renstra ini
8	Besaran tenaga yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahawan	V	40	45	0	0	0	0	0	0		Pelatihan ini tidak ada dalam masa renstra ini
	<b>Urusan ketrasmigrasian</b>											
9	Persentase Transmigran swakarsa		0,44	0,48	0	0	0	0	0	0		Kegiatan ini tdk terlaksana karena awal renstra belum didukung anggaran dan akhir renstra belum terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk pandemi covid 19

Berdasarkan Tabel diatas maka Program urusan Ketenagakerjaan ada beberapa program yang belum mencapai target yaitu: besaran tenaga yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi, persentase transmigran swakarsa, besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek.

### 2.3. Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan tugas, fungsi dan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur, dan telaahan terhadap Renstra Kementerian Ketenagakerjaan dan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Renstra Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT maka ditentukan isu strategis yang dirumuskan menjadi beberapa factor penghambat dan factor pendukung :

1. Rendahnya Daya saing SDM ketenagakerjaan.
2. Belum adanya BLK dan belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana BLK , serta minimnya kualitas dan kuantitas instruktur dan SDM Pengelola pelatihan.
3. Perlindungan terhadap hak tenaga kerja, termasuk belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh mediator Hubungan industrial
4. Belum maksimalnya pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi lokal.
5. Ketersediaan Sarana Prasarana yang lengkap dan sesuai standar yang dapat mendukung kinerja ( Gedung kantor, peralatan dan perlengkapan kantor)
6. Kawasan Translok yang penguasaannya masih ditanah ulayat dan terbatasnya pengalokasian anggaran untuk urusan transmigrasi.

Beberapa factor pendukung diantaranya :

1. Kerjasama lintas sector terkait masalah ketenagakerjaan dalam dan luar negeri serta urusan ketransmigrasian.
2. Adanya MOU dengan perusahaan dan stakeholder lainnya terkait kerjasama dibidang pelatihan dan penempatan.
3. Makin luasnya jejaring informasi pasar kerja dengan berbagai pihak yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja
4. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan TKI, PMI
5. Adanya perusahaan yang legal yang bias memfasilitasi tenaga kerja
6. Adanya peraturan tentang urusan ketransmigrasian .

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja 2023 apabila didukung oleh SDM dan SDA yang berkualitas maka diharapkan mampu untuk menekan jumlah tingkat pengangguran setiap tahunnya sehingga salah satu tujuan dari pembangunan di kabupaten Flores Timur dapat dicapai.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Renja**

Rumusan Pada bagian ini menjelaskan bahwa pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel II.3 dibawah ini :

**TABEL 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
<b>DINAS TENAGA KERJA</b>				2.237.405.602				3.181.760.960	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>				1.923.960.960				2.171.760.960	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<i>Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</i>	100	1.923.960.960		<i>Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</i>	100	2.171.760.960	
		<i>Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</i>	100			<i>Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</i>	100		
		<i>Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)</i>	100			<i>Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)</i>	100		

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
		<i>Presentase Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)</i>	100			<i>Presentase Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)</i>	100		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				65.000.000			12 dokumen	125.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD/Larantuka, semua kec	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)</i>	3 dokumen	25.000.000	OPD/Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)</i>	2 dokumen	55.000.000	<i>Koordinasi dan kegiatan untuk perencanaan termasuk pengambilan data dasar menyesuaikan dengan standar satuan</i>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	OPD/Larantuka	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)</i>	2 dokumen	10.000.000	OPD/Larantuka	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)</i>	2 dokumen	15.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OPD/Larantuka	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)</i>	2 dokumen	30.000.000	OPD/Larantuka	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)</i>	6 lap	30.000.000	

RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		10.000.000	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 lap	25.000.000	menyesuaikan dengan standar satuan harga
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	3 dokumen	1.446.460.960	OPD/Larantuka	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	3 dokumen	1.451.460.960	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD/Larantuka	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	20 org/14bulan	1.391.460.960	OPD/Larantuka	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	20 org/14 bulan	1.391.460.960,00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(dok)			OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(dok)			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)		35.000.000	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	1 dok	35.000.000	
koordinai dan pelaksanaan akuntansi SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 dok	10.000.000	OPD/Larantuka	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 dok	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		10.000.000	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	15.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	1	10.000.000	OPD/Larantuka	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	6 dokumen	10.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dok	10.000.000	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 dokumen	10.000.000	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	1 dok	15.000.000	OPD/Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	2 dokumen	35.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dok	10.000.000	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	30.000.000	bimtek untuk ASN ke luar daerah
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dok	5.000.000	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dok	5.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100,0	119.000.000	OPD/Larantuka	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	K482	168.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPD/Larantuka	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	2 paket	2.000.000	OPD/Larantuka	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	4 paket	4.000.000	Ada 2 gedung yang kebutuhan ini diperlukan, dan adanya penambahan harga ditahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD/Larantuka	<i>Jumlah paket perlatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)</i>	1 paket ATK, 1pkt tinta komputer	19.000.000	OPD/Larantuka	<i>Jumlah paket perlatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)</i>	1 paket ATK, 1pkt tinta komputer	19.000.000	
Penyediaan peralatan Rumah tangga	OPD/Larantuka	<i>Tersedianya peralatan rumah tangga</i>	1 paket alat kebersihan, 1 paket bahan pembersih	2.000.000	OPD/Larantuka	<i>Tersedianya peralatan rumah tangga</i>	<i>2 paket alat kebersih an, 2 paket bahan pembersi h</i>	4.000.000	2 Gedung yang akan memerlukan peralatan ini
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD/Larantuka	<i>Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan</i>	BBM untuk 3 unit roda 4, 2 roda 2	20.000.000	OPD/Larantuka	<i>Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan</i>	<i>BBM untuk 3 unit roda 4, 2 roda 2</i>	25.000.000	ada kenaikan harga di tahun 2023
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	OPD/Larantuka	<i>Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)</i>	2 paket (jilid dan penggandaan )	15.000.000	OPD/Larantuka	<i>Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)</i>	2 paket (jilid dan penggan daan)	20.000.000	adanya kenaikan harga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	OPD/Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 dokumen	1.000.000	OPD/Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	2 dokumen	1.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(laporan)	12 laporan	15.000.000	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(laporan)	12 laporan	15.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	45.000.000	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	80.000.000	melihat tingginya koordinasi yang perlu dibangun baik dalam dan luar provinsi NTT terkait ketenagakerjaan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	OPD/Larantuka			26.000.000	OPD/Larantuka			140.000.000	
Pengadaan Mebeleur	OPD/Larantuka	Tersedianya mebeleur yang diadakan (unit)	8 kursi meja kayu	4.000.000	OPD/Larantuka	Tersedianya mebeleur yang diadakan (unit)	15 kursi meja kayu,lem ari arsip	50.000.000	kebutuhan yang sangat diperlukan untuk menunjang karena kursi meja sdh rusak tidak sesuai dengan jumlah pegawai
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD/Larantuka	Tersedianya Jumlah peralatan dan mesin lainnya (unit)	2 kipas angin	2.000.000	OPD/Larantuka	Tersedianya Jumlah peralatan dan mesin lainnya (unit)	4	10.000.000	Kipas angin untuk tiap bidang belum ada
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya(unit)	1 unit laptop, printer	20.000.000	OPD/Larantuka	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya(unit)	5 unit laptop,3 printer	80.000.000	beberapa unit laptop dan printer tidak dapat berfungsi lagi dengan baik

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OPD/Larantuka	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)</i>	100	209.500.000	OPD/Larantuka	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)</i>	100	211.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD/Larantuka	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)</i>	12 laporan	1.500.000	OPD/Larantuka	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)</i>	12 laporan	2.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD/Larantuka	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)</i>	12 laporan	16.000.000	OPD/Larantuka	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)</i>	12 laporan	17.000.000	Untuk 2 gedung
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD/Larantuka	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)</i>	12 laporan	192.000.000	OPD/Larantuka	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)</i>	12 laporan	192.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OPD/Larantuka	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah(%)</i>	100,000	33.000.000	OPD/Larantuka	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah(%)</i>	100	31.300.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OPD/Larantuka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit = roda 4 (1 unit), roda 2 ( 2unit)	15.000.000	OPD/Larantuka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit = roda 4( 1 unit), roda 2( 2unit)	15.000.000	
Pemeliharaan Mebel	OPD/Larantuka	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 kursi; 10 meja	5.000.000	OPD/Larantuka	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 kursi	5.000.000	diperlukan untuk rehab kursi kayu untuk kebutuhan penunjang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(unit)	2 unit AC	3.000.000	OPD/Larantuka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(unit)	2 unit AC	3.300.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	2 unit	4.000.000	OPD/Larantuka	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	2 unit	4.000.000	perlu nya perbaikan pada atap dan plafon gedung kantor
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	5 laptop, 6 printer	5.000.000	OPD/Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	2 paket laptop, 2 printer	3.000.000	dengan adanya pengadaan sehingga biaya pemeliharaan dapat ditekan
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	1 unit	1.000.000	OPD/Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	1 unit	1.000.000	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
	OPD/Larantuka				OPD/Larantuka				
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>				218.444.642				645.000.000	
<b>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Produktivitas Tenaga Kerja</b>		<i>Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)</i>	2,86	54.494.642		<i>Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)</i>	2,88	195.000.000	
		<i>Persentase pemenuhan sarana pelatihan BLK (%)</i>				<i>Persentase pemenuhan sarana pelatihan BLK (%)</i>			
<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>			10	52.494.642			10	185.000.000	
<b>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</b>	Larantuka, seluruh Kecamatan , Kec. Ilemandiri, kel.sarotari tengah, kel.pohon sirih, kec. Adonara timur	<i>Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi</i>	10 orang (1kelompok)	50.494.642	Larantuka, seluruh Kecamatan	<i>Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi</i>	30 org	180.000.000	penambahan volume orang sehingga efektifitas dapat tercapai

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Larantuka	<i>Jumlah Kesepakatan/koordinasi dalam rangka Optimilisasi Kapasitas Instruktur dan peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Voikasi dan Produktivitas pada tahun</i>	2	2.000.000	Larantuka	<i>Jumlah Kesepakatan/koordinasi dalam rangka Optimilisasi Kapasitas Instruktur dan peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Voikasi dan Produktivitas pada tahun</i>	5	5.000.000	koordinasi ke lembaga yang memiliki sarana prasarana
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta				2.000.000				10.000.000	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	Larantuka	<i>Jumlah lembaga pelatihan swasta yang dibina (lembaga)</i>	5	2.000.000	larantuka	<i>Jumlah lembaga pelatihan swasta yang dibina (lembaga)</i>	5	10.000.000	perlunya pembinaan pelatihan swasta untuk mengukur kualitas lembaga pelatihan swasta
Program Penempatan Tenaga Kerja		<i>Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)</i>	47,2	86.950.000		<i>Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)</i>	47,7	310.000.000	
Pelayanan Antar Kerja di Derah kab/Kota				60.000.000				270.000.000	
Pelayanan Antar Kerja	kab. Flotim	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL</i>	100	5.000.000		<i>Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL</i>	100	10.000.000	perlunya pembinaan sebelum tenaga kerja ditempatkan,

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
Penyuluhan dan Bimbingan jabatan Bagi Pencari Kerja	Larantuka	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100	5.000.000		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100	10.000.000	pentingnya memberikan penyuluhan pada calon tenaga kerja sehingga kesiapan calon tenaga kerja dapat optimal
Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Flotim, kec. Solor barat, kec. Ilebolog, kec. Klubagolit, kec. Adonara, kec. wotanulumado	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	10	50.000.000	Kab. Flotim, kec. Solor barat, kec. Ilebolog, kec. Klubagolit, kec. Adonara, kec. wotanulumado	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	30	250.000.000	melihat HOK perhari dan kualitas pekerjaan
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000				-	
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	kab.flotim	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	2	2.000.000	kab.flotim	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	2	-	
Pengelola Informasi Pasar Kerja				250.000				10.000.000	
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	kab. Flotim	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi Informasi Pasar Kerja online	1	250.000	kab. Flotim;NTT	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi Informasi Pasar Kerja online	1	10.000.000	perlunya bimtek bagi pengelola dan pendukung aplikasi ini

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kab/Kota		<i>Tersedianya Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di daerah Kab/Kota</i>		24.700.000		<i>Tersedianya Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di daerah Kab/Kota</i>		30.000.000	
Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI	Kab. Flotim	<i>Jumlah CPMI /PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya</i>	250	6.700.000	Kab. Flotim	<i>Jumlah CPMI /PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya</i>	250	10.000.000	
Penyediaan layanan Terpadu pada calon pekerja migran	Kab.Flottim	<i>Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani</i>	525	8.000.000	Kab.Flottim	<i>Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani</i>	525	-	
Pemberdayaan pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab.Flottim	<i>Jumlah PMI Purna yang diberdayakan</i>	20	10.000.000	Kab.Flottim	<i>Jumlah PMI Purna yang diberdayakan</i>	50	20.000.000	banyaknya PMI yang dideportasi,PHK yang perlu pemberdayaan
<b>Program Hubungan Industrial</b>		<i>Persentase Perkara Perselisihan yang ditangani (%)</i>	80	77.000.000		<i>Persentase Perkara Perselisihan yang ditangani (%)</i>	80	140.000.000	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKB untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam dsatu daerah Kab/Kota				35.000.000					

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Kab.Flötim	<i>Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terdaftar dengan Hub WKLP online</i>	10	10.000.000	Kab.Flötim	<i>Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terdaftar dengan Hub WKLP online</i>	10	10.000.000	
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi perusahaan	Kab.Flötim	<i>Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerjasama</i>	10	10.000.000	Kab.Flötim	<i>Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerjasama</i>	15	25.000.000	meningkatnya jumlah kasus diikuti oleh anjuran untuk PB
Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Kab.Flötim	<i>Jumlah data dan informasi sarana hubungan industrial (PP/PKB) struktur sakala upah dan LKS biparti) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (laporan)</i>	10	15.000.000	Kab.Flötim	<i>Jumlah data dan informasi sarana hubungan industrial (PP/PKB) struktur sakala upah dan LKS biparti) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (laporan)</i>	15	20.000.000	dengan pendataan ini dapat dijadikan usulan tentang besaran UMR untuk tingkat propinsi dan kabupaten
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah kab/kota				42.000.000				85.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
Pencegahan Perselisihan Hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kab/Kota	Kab.Flortim	Jumlah Perselisihan yang dicegah	15	15.000.000	Kab.Flortim	Jumlah Perselisihan yang dicegah	20	30.000.000	setiap tahunnya jumlah perselisihan meningkat antara pemberi dan penerima kerja sehingga diperlukan sosialisasi berbagai peraturan ketenagakerjaan
Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial .mogok kerja, dsan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan satu daerah kab/Kota	Kab.Flortim	jumlah perkara Perselisihan yang terselesaikan	10	10.000.000	Kab.Flortim	jumlah perkara Perselisihan yang terselesaikan	20	30.000.000	meningkatnya jumlah kasus perselisihan memerlukan pendampingan oleh mediator
Penyelenggaraan Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh/serta non afiliasi	Kab.Flortim	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi (asosiasi dan Serikat Perikat)	6	10.000.000	Kab.Flortim	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi (asosiasi dan Serikat Perikat)	6	15.000.000	kegiatan ini sdh 3 tahun tidak pernah terlaksana sehingga data terkait ini untuk dilaporkan ke provinsi tidak adapat terlaksana
Pengembangan Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Kab.Flortim	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	10	7.000.000	Kab.Flortim	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	10	10.000.000	penyesuaian dengan standar
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi</b>				<b>95.000.000</b>				<b>365.000.000</b>	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
<b>Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi</b>		<i>Jumlah Dokumen Identifikasi potensi kawasan transmigrasi (Dokumen)</i>	2	45.000.000		<i>Jumlah Dokumen Identifikasi potensi kawasan transmigrasi (Dokumen)</i>	1	65.000.000	
Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi				45.000.000				65.000.000	
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kec. Tanjung Bunga dan kec. Demon Pagong	<i>Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dok)</i>	2 Dok	10.000.000	Kec. Tanjung Bunga dan kec. Demon Pagong	<i>Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dok)</i>	2 dok	15.000.000	pentingnya koordinasi lintas sektor
Advokasi dan Musyawarah penetapan kawasan	Kec. Tanjung Bunga dan kec. Demon Pagong	<i>Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan Transmigrasi</i>	5	10.000.000	Kec. Tanjung Bunga dan kec. Demon Pagong	<i>Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan Transmigrasi</i>	5	15.000.000	melibatkan peetinggi daerah dan besaran biaya pendukung untuk ke lokasi translok
Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	Kec. Tanjung Bunga dan kec. Demon Pagong	<i>Luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi</i>	2	25.000.000	Kec. Tanjung Bunga dan kec. Demon Pagong	<i>Luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi</i>	3	35.000.000	untuk pendataan lokasi
<b>Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>		<i>Presentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang dikembangkan</i>	50	50.000.000		<i>Presentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang dikembangkan</i>	50	300.000.000	
Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian				50.000.000				300.000.000	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	4 UPT	Jumlah KK Transmigran yang dibina (KK)	50	10.000.000		Jumlah KK Transmigran yang dibina (KK)	200	50.000.000	pembinaan berupa pelatihan kemandirian pada warga translok
Penguatan insfrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	3 UPT ( UPT Tanameang; UPT Watanpao ; UPT Purinara )	Jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur soaial, ekonomi dan kelebambagaan (satuan pemukiman)	1	40.000.000		Jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur soaial, ekonomi dan kelebambagaan (satuan pemukiman)	3	250.000.000	perbaikan infrastruktur rumah ibadah di kawasan translok

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil analisis kebutuhan lebih besar dibandingkan dengan rancangan awal RKPD karena adanya penambahan target dan volume yang akan dicapai serta adanya penyesuaian standar biaya pada tahun 2023.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program/kegiatan pemangku kepentingan disajikan dalam bentuk usulan musrenbang kecamatan tiap tahunnya yang direkap oleh PD melalui aplikasi SIPD. Usulan tersebut berupa usulan dari masyarakat dan pokok pikiran anggota DPRD . Uraian tersebut dapat dilihat pada table lampiran II.4

**Tabel II.4**  
**Usulan Program Dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2023**  
**Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur**

No.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		-		
1	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>		<b>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi ( Orang)</b>		
	<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</i>	<i>Larantuka</i>	<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Bimtek dan Kelompok yang didampingi ( Orang, Kelompok)</i>	<i>desa Riangkemie (50 org), desa menanga usul 20 orang</i>	<i>Usulan diterima untuk lokasi peserta tapi untuk jumlah peserta dari tiap desa disesuaikan dengan kuota usulan peserta pelatihan .Usulan Kec.Ilemandiri Desa Riangkemie; Kec.larantuka kel.sarotari timur, kel.sarotari tengah, Kec. Adonara Timur Desa Dawataa; Kec.Ileboleng desaDokeng; Kec. Solor Timur desa menanga; kec. Larantuka kel. Sarotari ;Kel.Amangarapati; Kec.solor Barat desa Tanahlein; Kec. Wotan ulumado desa Nayubaya ; Kec.Adonara Barat Desa Danibao</i>
2	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>		<b>Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)</b>		
	<i>Pelayanan Antar Kerja di daerah Kab/kota</i>	<i>Tersebar di 19 Kecamatan</i>	<i>Tersedianya Jumlah pelayanan antar kerja di daerah Kab/Kota</i>		<i>Usulan dari Desa Menanga, Desa Kwaelaga Lamawato ; Usulan ini diterima karena sesuai dengan program/kegiatan dalam OPD</i>

				<p>Vol 1.000 m desa Daniwato; Desa Hokeng Jaya vol ruas jalan 600 m; padat karya lorong 570 m desa pamangkayo; ruas jalan desa lelen bala 500 m; kel. balela ruas jalan 430 m; ruas jalan desa latonliwo dua 400 m; desa mokantarak dengan ruas jalan 100 m; Ruas jalan desa blo0 1000 m ; kel. balela 500 m</p>	<p>Usulan dari Kec.solor Barat Desa Daniwato; Kec.Solor Timur Desa Liwo; Kel.Lewolere Kec.Larantuka, Kec.wulanggitang Desa Hokeng Jaya; Kec.Solor Barat desa Pamangkayo; Kec. Adonara timur desa Tapobali; Kec. Adonara timur desa lelen bala ; Kec. Solor Barat desa ritaebang ; kel. pohon sirih Kec. Larantuka ; Kec. larantuka kel.balela ; Kec. tanjung Bunga desa lataoliwo dua; Desa mokantarak kec. Larantuka; Kec. Adonara Timur desa bloto ; Kec. Larantuka kel. Amagarapati ; Kel.balela. Bweberapa yang diterima karena disesuaikan dengan alasan pengusulan dan sesuai dengan padat karya yaitu DEsa nelelamadike Kec. Ileboleng ;DEsa Nobo kec. Ileboleng ; Desa Radontena Adobala kec. Klubagolit ; Bukit Seburi II kec. Adonara Barat ; Desa Nayubaya kec. Wotan Ulumado, Desa Kolilanang Kec. Adonara</p>
				<p>vol 100 m kel.nelelamadike kec. Ileboleng, 100 m desanobo; 2 lahan di kec. Tanjung bunga ; 50 org pekerja desa Redontenadan Adobala; Kec. Adonara barat Desa Bukit seburi II ; Kec. Wotan Ulumado Desa Nayubaya 100 m; Kec. Adonara Kel. Kolilanang 100 m</p>	<p>Pokir dari Kec. Ileboleng Desa nelekamadike, Desa Nobo ; Kec. Tanjung Bunga ; Kec. Klubagolit desa Redontenadan Adobala; Kec. Adonara Barat Desa Bukit Seburi II Kec. Adonara barat ; Kec. Wotan ulumado Desa Nayubaya ; Kec. Adonara kel.kolilanang 100 m</p>
	<p>Perlindungan PMI (Pra dan purna penempatan) didaerah Kab/Kota</p>	<p>Tersebar di 19 Kecamatan</p>	<p>Tersedianya perlindungan PMI (Pra dan purna Penempatan) di daerah kab/Kota</p>	<p>warga dusun I,II,III desa menanga ;</p>	<p>Kec. Solor Timur desa menanga ; kec. Adonara timur desa Kwaelaga lamawato ; kec. Adonara Timur desa Lamalata ; Semua usulan tentang perlindungan PMI diakomodir</p>

Berdasarkan Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2023 di atas, semua usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah dirangkum dari hasil musyawarah rencana pembangunan di Kecamatan tahun 2022. Ada usulan yang diterima dan ada usulan yang ditolak. Usulan yang diterima disesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada pada masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan, dan pertimbangan ketersediaan anggaran serta skala prioritas.

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan Daerah dan Nasional, serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN, Pemerintah telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi pelaksanaan pembangunan yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Untuk mendukung 5 (lima) arahan pemerintah tersebut dan memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2023, Pemerintah menetapkan tema RKP Tahun 2023 yaitu "*Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*".

Tema pembangunan tersebut dilaksanakan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yakni (1) *Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan*; (2) *Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan*; (3) *Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing* (4) *Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan*; (5) *Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar*; (6) *Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim*; dan (7) *Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik*.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur mengemban PN (3) dimana PN (3) dilaksanakan melalui pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; pengentasan kemiskinan; dan Peningkatan produktivitas dan daya saing. Program yang mendukung prioritas tersebut antara lain Program Penempatan Tenaga Kerja; Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Kebijakan Nasional tersebut harus mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergi dan terintegrasi pada bidang tenaga kerja. Dengan demikian, komunikasi, koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah harus terus dipertahankan untuk menjaga momentum pembangunan. Konsistensi kebijakan antara pusat dan

daerah akan tercapai jika dijumpatani oleh sinergitas pusat-daerah oleh berbagai pemangku kepentingan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja tahun 2023-2026 sebagaimana terlihat pada tabel III.1 berikut:

**Tabel. III.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja**  
**Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
			2021	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya daya saing	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,81	3,56	3,31	3,00	2,85

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rancangan awal Perangkat Daerah pada RKPD mencakup sebanyak 6 program, Jumlah kegiatan 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

Untuk mencapai sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui program-program prioritas. Jumlah Program prioritas pada bidang ketenagakerjaan berdasarkan RKPD taun 2023 sebanyak 2 program, yakni Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Produktivitas Tenaga Kerja , dan Program Penempatan Tenaga Kerja.

Program prioritas bidang ketenagakerjaan dengan indikator dan target kinerja sebagaimana terlihat pada tabel III.2 berikut ini.

Tabel III.2  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan perangkat Daerah Tahun 2023  
 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Rencana Tahun 2023				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif	sumber dana		Target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	0-0	02		Dinas Tenaga Kerja				2.985.405.960				2.743.297.484
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				471.445.000	APBD II (DAU)			328.250.000
2	07	03			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	<i>Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)</i>		2,86	184.495.000	APBD II (DAU)		2,88	125.000.000
						<i>Jumlah Sarana dan Prasarana pelatihan kerja yang memenuhi standar (Unit)</i>				DAU			
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan			30 orang	182.495.000	DAU		25 orang	125.000.000

Tabel III.2  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan perangkat Daerah Tahun 2023  
 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Rencana Tahun 2023				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif	sumber dana		Target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Berdasarkan Unit Kompetensi								
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	<i>Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi</i>	<i>larantuka (Lok. Asal peserta:Desa Riangkemie, Kec.Ile Mandiri,Kel. Sarotari Tengah, Kel. Pohon Siri, Kec.Larantuka, Desa Dawataa, Kec.Adonara Timur, Seluruh Kecamatan)</i>	30 org	172.495.000	DAU	<i>disesuaiakn dengan besaran pagu untuk kuota pelatihan</i>	25 orng	115.000.000
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	<i>Jumlah Kesepakatan/koordinasi dalam rangka Optimilisasi Kapasitas Instruktur dan peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Voikasi dan Produktivitas pada tahun n</i>	<i>Kab.Flortim</i>	5 lembaga	10.000.000	DAU		5 lembaga	10.000.000

Tabel III.2  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan perangkat Daerah Tahun 2023  
 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Rencana Tahun 2023				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif	sumber dana		Target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	Kab.Flortim		2.000.000	DAU			-
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	Jumlah lembaga pelatihan swasta yang dibina (lembaga)	Kab.Flortim	5 lembaga	2.000.000	DAU		0	
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)		47,2	196.950.000	DAU		47,7	133.250.000
2	07	04	2.01		pelayanan Antar Kerja di Derah kab/Kota	Tersedianya Jumlah pelayanan antar kerja di daerah kab/kota	Kab.Flortim	orang	131.700.000	DAU		orang	106.000.000
2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber daya pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yyang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain lain untuk peningkatan kompetensi	Kupang		-	DAU		1 orang	-

Tabel III.2  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan perangkat Daerah Tahun 2023  
 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Rencana Tahun 2023				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif	sumber dana		Target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL</i>	<i>Kab.Flortim</i>	100 orang	10.000.000	DAU		100 orang	6.000.000
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan jabatan Bagi Pencari Kerja	<i>Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan</i>	<i>Larantuka-Ibu Kota Kabupaten (Lok.Asal Peserta:Desa Menanga, Kec. Solor Timur, Desa Kewaelaga Lamawato, Kec. Adonara Timur, Desa Watowara-Kec.Titehena)</i>	100 orang	10.000.000	DAU		100 orang	6.000.000
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja</i>	<i>Kec. Solor Barat9.Desu Daniwato, KEC.Ile Boleng(Desa Nelelamadike,Nobo)Kec.Kl ubagoliti(Redontena, Adobala)kec.Adoanara(Desa Kolilanang)Kec Adonara Barat(Desa Bukit Saburi 2), Kec. Wotanulumado(Desa Nayubaya)</i>	30 orang	111.700.000	DAU	disesuaiakan dengan usulan masyarakat dan besaran pagu	20 org	94.000.000

Tabel III.2  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan perangkat Daerah Tahun 2023  
 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Rencana Tahun 2023				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu Indikatif	sumber dana		Target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5			6	7	8	9		10	
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penerimaan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang memiliki izin dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Flotim	5 lembaga	10.000.000	DAU		2 lembaga	2.000.000
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Kab. Flotim	5 lembaga	10.000.000	DAU		2 lembaga	2.000.000
2	07	04	2.03		Pengelola Informasi Pasar Kerja	Tersedianya informasi pasar kerja	OPD/ larantuka	1 dokumen	250.000	DAU		1 dokumen	250.000
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi Informasi Pasar Kerja online	OPD/ larantuka	1 dokumen	250.000	DAU		1 dokumen	250.000

Tabel III.2  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan perangkat Daerah Tahun 2023  
 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Rencana Tahun 2023				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif	sumber dana		Target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	<i>Jumlah Pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (orang)</i>	<i>OPD/ larantuka</i>	0	-	DAU		0	
2	07	04	2.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kab/Kota	<i>Tersedianya Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di daerah Kab/Kota</i>	<i>Kab.Flotim</i>	795 orang	55.000.000	DAU		645 orang	25.000.000
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI	<i>Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya</i>	<i>Kab.Flotim-Larantuka,(Kec.Adon ara Timur, Desa Lamalota)</i>	250 orang	15.000.000	DAU		200 org	8.000.000
02	07	04	2.04	02	Penyediaan layanan Terpadu pada calon pekerja migran	<i>Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI</i>	<i>Kab.Flotim</i>	525 orang	25.000.000	DAU		200 org	8.000.000

Tabel III.2  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan perangkat Daerah Tahun 2023  
 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Rencana Tahun 2023				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif	sumber dana		Target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<i>bermasalah yang ditangani</i>							
02	07	04	2.04	03	Pemberdayaan pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	<i>Jumlah PMI Purna yang diberdayakan</i>	<i>Kab.Flotim</i>	20 orang	15.000.000	DAU		15 org	9.000.000

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah, maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III dan dirumuskan per program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Perangkat Daerah tahun 2023, dapat dilihat pada tabel IV.1

Tabel IV.1

## Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2-7	3-32	0-0	01		<b>DINAS TENAGA KERJA</b>		2.985.405.960					2.743.297.484		
2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		2.313.960.960					2.290.047.484		
2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.313.960.960			PP	100	2.290.047.484	
						Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100		
						Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	60					100		
						Presentase Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100					100		
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dokumen)	12	135.000.000	OPD/Larantuka		KP	12	125.000.000	
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	55.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)		2	45.000.000	
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	2	25.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)		2	25.000.000	
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	6	30.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)		6	30.000.000	
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	25.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)		4	25.000.000	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dokumen)	4	1.471.460.960	OPD/Larantuka			KP	4	1.516.247.484
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	20	1.391.460.960	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			20	1.426.247.484
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	1	50.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			1	55.000.000
2	07	01	2.02	05	koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD (Dokumen )	1	15.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			1	15.000.000
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	15.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			2	20.000.000
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)	1	15.000.000	OPD/Larantuka			KP	1	15.000.000
2	07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	15.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			6	15.000.000
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		20.000.000	OPD/Larantuka			KP		20.000.000
2	07	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	15.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			1	15.000.000
2	07	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	5.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			1	5.000.000
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	250.030.000	OPD/Larantuka			KP	100	255.500.000
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket )	3	3.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			3	3.000.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)	4	42.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			3	31.500.000
2	07	01	2.06	03	Penyediaan peralatan Rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	1	5.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			1	5.000.000
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan (Paket)	2	50.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			2	53.000.000
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	2	25.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			2	25.000.000
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			1	1.000.000
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12	24.030.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			12	30.000.000
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	100.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			12	107.000.000
2	07	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan (Unit)</b>	<b>35</b>	<b>194.000.000</b>	<b>OPD/Larantuka</b>			<b>KP</b>	<b>26</b>	<b>115.100.000</b>
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebel yang disediakan (Unit)	15	35.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			20	45.000.000
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	4	4.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			1	7.000.000
2	07	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1	100.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			-	-
2	07	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	3	40.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			4	55.000.000
2	07	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan ( unit )	11	15.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			1	8.100.000
2	07	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>182.200.000</b>	<b>OPD/Larantuka</b>			<b>KP</b>	<b>100</b>	<b>186.200.000</b>

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	5.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			12	5.000.000
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	12.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			12	15.000.000
2	07	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan( Laporan )	1	2.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			1	3.000.000
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	163.200.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			12	163.200.000
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100,000	46.270.000	OPD/Larantuka			KP	100	57.000.000
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	15.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			3	20.000.000
2	07	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	15	6.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			20	10.000.000
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(unit)	2	5.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			2	8.000.000
2	07	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset tak berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara (unit)	1	5.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			1	10.000.000
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2	6.770.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			1	3.000.000
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	11	6.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			5	4.000.000
2	07	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	1	2.500.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			1	2.000.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	07				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			471.445.000						328.250.000
2	07	03			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)	2,86	184.495.000			PN-3	PU-2	2,88	125.000.000
						Persentase pemenuhan sarana pelatihan BLK (%)	0						0	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	30	182.495.000			KP-3	KU-2	10	125.000.000
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	30	172.495.000	Larantuka (Lokasi asal Peserta : Desa Riangkemie Kec. Ile Mandiri, Kelurahan Sarotari Tengah, Kel. Pohon Sirih Kec. Larantuka, Desa Dawataa Kec. Adonara Timur, seluruh Kecamatan )	APBD II (DAU)			25	115.000.000
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/koordinasi dalam rangka Optimilisasi Kapasitas Instruktur dan peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Voikasi dan Produktivitas pada tahun (Lembaga)	5	10.000.000	Kabupaten Flores Timur	APBD II (DAU)			5	10.000.000
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	Jumlah lembaga pelatihan swasta yang dibina (lembaga)	5	2.000.000					-	-
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	Jumlah lembaga pelatihan swasta yang dibina (lembaga)	5	2.000.000	Kabupaten Flores Timur	APBD II (DAU)			-	-
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	47,2	196.950.000	Kabupaten Flores Timur		PN-3	PU-2	47,7	133.250.000
2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Derah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL (Orang)	100	131.700.000			KP-3	KU-2	100	106.000.000
2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL (Orang)	100	10.000.000	Kabupaten Flores Timur	APBD II (DAU)			100	6.000.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (orang)	100	10.000.000	Larantuka-Ibu Kota Kabupaten (Lokasi asal peserta: Desa Menanga Kec. Solor Timur, Desa Kwaelaga Lamawato Kec. Adonara Timur, Desa Watowara-Kec. Titehena).	APBD II (DAU)			100	6.000.000
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	30	111.700.000	Kec. Solor Barat (Desa Daniwato) Kec. Ile Boleng (Desa Nelelamadike, Nobo), Kec. Klubagolit (Redontena, Adobala) Kec. Adonara (Desa Kolilanang), Kec. Adonara Barat (Desa Bukit Seburi II), Kec. Wotan Ulumado (Desa Nayubaya)	APBD II (DAU)			20	94.000.000
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja dalam 1 tahun di kab/kota (lembaga)	5	10.000.000	kab flotim		KP-3	KU-2	2	2.000.000
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	5	10.000.000	Kabupaten Flores Timur	APBD II (DAU)			2	2.000.000
2	07	04	2.03		Pengelola Informasi Pasar Kerja			250.000			KP-3	KU-2	1	250.000
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi Informasi Pasar Kerja online (dokumen)	1	250.000	Kabupaten Flores Timur	APBD II (DAU)			1	250.000
2	07	04	2.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kab/Kota	Tersedianya Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di daerah Kabupaten/Kota	775	55.000.000			KP-3	KU-2	400	25.000.000
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI	Jumlah CPMI /PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya (orang)	250	15.000.000	Kabupaten Flores Timur - Larantuka, (asal peserta : Desa Lamalota Kec. Adonara Timur)	APBD II (DAU)			200	8.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
02	07	04	2.04	02	Penyediaan layanan Terpadu pada calon pekerja migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani (Orang)	525	25.000.000	Kabupaten Flores Timur	APBD II (DAU)			200	8.000.000
02	07	04	2.04	03	Pemberdayaan pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan (Orang)	20	15.000.000	Kabupaten Flores Timur	APBD II (DAU)			15	9.000.000
2	07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase Perkara Perselisihan yang ditangani (%)	80	90.000.000	Kabupaten Flores Timur			PP	80	70.000.000
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKB untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam dsatu daerah Kab/Kota	Tersedianya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah kab/kota	10	35.000.000				KP	10	10.000.000
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terdaftar dengan Hub WKLP online (Perusahaan)	10	10.000.000	Kabupaten Flores Timur	APBD II (DAU)			10	10.000.000
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerjasama (Perusahaan)	10	10.000.000	Kabupaten Flores Timur	APBD II (DAU)			-	-
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana hubungan industrial (PP/PKB) struktur sakala upah dan LKS biparti) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (laporan)	10	15.000.000	Kabupaten Flores Timur	APBD II (DAU)			-	-
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	jumlah perselisihan yang dapat dicegah dan diselesaikan	15	55.000.000				KP	20	60.000.000
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah (Perkara)	15	21.000.000	Kabupaten Flores Timur	APBD II (DAU)			20	25.000.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial .mogok kerja, dsan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan satu daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara Perselisihan yang terselesaikan( Perkara )	10	17.000.000	Kabupaten Flores Timur	APBD II (DAU)			15	20.000.000
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh/serta non afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi (asosiasi dan Serikat Pekerja)	6	10.000.000	Kabupaten Flores Timur	APBD II (DAU)			6	10.000.000
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja( Orang)	100	7.000.000	Kabupaten Flores Timur	APBD II (DAU)			50	5.000.000
3	32				Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			200.000.000						125.000.000
3	32	02			Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Identifikasi potensi kawasan transmigrasi (Dokumen)	2	50.000.000				PP	1	25.000.000
3	32	02	2.01		Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan Transmigrasi (kawasan)	4	50.000.000				KP	2	25.000.000
3	32	02	2.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	2	10.000.000	Kec. Tanjung Bunga (desa Waibao), Kec. Demon Pagong (Desa Lewoktuok)	APBD II (DAU)			2	25.000.000
3	32	02	2.01	02	Advokasi dan Musyawarah penetapan kawasan	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi)	4	30.000.000	Kec. Adonara Timur (Desa Tuawolo, Narasaosina, Bloto), Kec. Titehana (Adabang)	APBD II (DAU)			-	-
3	32	02	2.01	03	Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	Luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi (Hektar)	2 UPT (604 Hektar)	10.000.000	Kec. Tanjung Bunga (Desa Lewobunga, Latonliwo, Sinarhadigala), Kec. Adonara Timur (Desa Kiwangona)	APBD II (DAU)				

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
3	32	03			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran pada UPT yang dibangun (%)	2	100.000.000				PP	-	-
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk	Tersedianya jumlah penataan persebaran penduduk	2	100.000.000				KP	-	-
3	32	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan jumlah pemukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang) (Dokumen)	1	75.000.000	Desa Waibao, Desa Lewokluok	APBD II (DAU)			-	-
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon Transmigran yang mendapatkan penyuluhan (Kepala Keluarga)	250	25.000.000	Desa Waibao, Desa Lewokluok	APBD II (DAU)			-	-
3	32	04			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang dikembangkan (%)	50	50.000.000				PP	50	100.000.000
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada tahap kemandirian	Tersedianya jumlah pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian (Satuan Pemukiman)	2	50.000.000				KP	2	100.000.000
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina (Kepala Keluarga)	50	10.000.000	UPT Purinara Desa Saosina, UPT Tanah Meang Desa Adabang	APBD II (DAU)			50	10.000.000
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan (satuan pemukiman)	2	40.000.000	Kec. Adonara Timur (Desa Narasaosina, Beloto, Dusun III Libu Desa Lamalota)	APBD II (DAU)			2	90.000.000

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur tahun 2023 mengacu pada tugasnya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja disamping program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk dilaksanakan tahun 2023. Penentuan prioritas tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu mendesak untuk dilaksanakan, menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, memiliki peran dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah dan realistis untuk dilaksanakan.

Melalui penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien, dalam kerangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Selubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Semua stakeholders yang berkepentingan dalam pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur berkewajiban untuk menjadikan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunan terutama dalam urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga.
2. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD.
3. Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik baik triwulan, semesteran maupun akhir tahun yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2023.
4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan.

Dokumen ini menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2023 akan berjalan efektif jika terdapat komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk menerapkannya dalam rangka mencapai prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Tahun 2023.

Larantuka, Juli 2022  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Flores Timur,

**Drs. Ramon Mandiri Piran**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 196705011993031014